BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan Igo Motor kabupaten sarolangun ada 15 diantaranya 7 yang melaksanakan sesuai isi perjanjian dan 8 sampel responden yang belum terlaksana sepenuhnya, masih terdapat debitur yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan seperti debitur yang melakukan wanprestasi berupa penunggakan pembayaran angsuran , debitur yang memindahtangankan kendaraan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur dan yang tidak mau melanjutkan pembayaran angsuran. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah karena faktor ekonomi, kelalaian dan kesengajaan.
2. Kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian diantaranya Penyerahan kendaraan bermotor oleh debitur kepada perusahaan ketika debitur telah jatuh tempo / penunggakan angsuran, jika dilakukan penarikan paksa akan menambah biaya, dan juga mengesankan penyelesaian yang kurang menghormati hak konsumen jika penunggakan angsuran disebabkan karena faktor ekonomi. Upaya penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dapat ditempuh dengan memberikan surat peringatan dengan tahap 1.2 dan 3 diseratakan denda atas keterlambatan

pembayaran serta biaya tagih. Apabila dengan surat peringatan tersebut debitur tidak dapat melakukan kewajibannya maka debitur mengikatkan diri untuk menyerahkan kendaraan atau tetap menuntut pembayaran angsuran dan untuk debitur yang memindahtangankan kendaraan tanpa sepengetahuan kreditur akan dikenakan sanksi pidana.

B. Saran

1. Sebaiknya para pihak menjalankan kewajibannya sebagai mana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen, terutama bagi pihak debitur agar tidak lalai dalam membayar angsuran sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati dan debitur harus mengupayakan pembayaran angsuran yang dibebankan kepadanya sesuai yang telah diperjanjikan.
2. Diharapkan bagi pihak CV. IGO MOTOR, sebaiknya sebelum mengadakan perjanjian bisa lebih teliti lagi dalam menilai kemampuan ekonomi calon debitur tersebut agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen secara sewa beli di kemudian hari.